

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
BELANJA MODAL

(STUDI LKPD SE-PULAU JAWA TAHUN 2011-2012)

Bagus Setya Budi

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : Bagus.setya.budi@gmail.com / telp : +6285248153000

ABSTRACT

The main purpose of this study is to obtain empirical of general allocation fund, local original revenue, budget bottom line, area width, population, and economic growth on capital expenditures. Samples of 224 local government were gathered using purposive sampling method. Hypotheses were tested using multiple regression.

The results showed that general allocation fund has significantly effect on capital expenditures with positive direction, local original revenue has significantly effect on capital expenditures with positive direction, economic growth has significantly effect on capital expenditures with positive direction and population of local government has significantly effect on capital expenditures with positive direction. Otherwise budget bottom line, area width do not have significantly effect on the capital expenditures.

Keywords: General Allocation Fund, Local Original Revenue, Budget Bottom Line, Area Width, Population, Economic Growth, Capital Expenditures

PENDAHULUAN

Sistem otonomi daerah lebih menitikberatkan pada kepentingan kabupaten dan kota, oleh karena itu kabupaten dan kota menerima sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Atas pemberian kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan pengalokasian sumber daya yang dimiliki, untuk belanja guna memajukan daerahnya, dengan menganut asas

kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan dari suatu daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Dalam anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja suatu daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD adalah untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain; Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, yang dimaksud dengan pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan menggunakan sistem desentralisasi sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan dari semua sektor terutama sektor publik, dan dengan adanya peningkatan pelayanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pula daya tarik bagi para investor yang akan menanamkan modalnya ke suatu daerah.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Maharani, 2010). Dengan meningkatnya pengeluaran belanja modal diharapkan akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena hasil dari belanja modal adalah

meningkatnya aset tetap dari suatu daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemda. Dalam sistem desentralisasi ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur masalah pembiayaan bagi daerahnya.

Sumber pembiayaan yang penting bagi pemda adalah PAD yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Menurut data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010, DAU merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan, yaitu sekitar 3,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi Dana Perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran pemda sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Pada tahun 2007 persentase dana perimbangan adalah 78% dari total pendapatan daerah sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 73% (DJPK-Kemenkeu, 2011).

Pada realisasi APBD tahun anggaran 2011 memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah lebih tinggi dibandingkan dengan anggarannya, sehingga mengakibatkan terjadinya surplus di akhir tahun. Realisasi pendapatan lebih tinggi Rp 66,9 triliun dan realisasi belanja daerah juga lebih tinggi Rp 22,7 triliun dari anggarannya, yang patut menjadi perhatian adalah bahwa terjadinya surplus dalam realisasi APBD 2011 ternyata lebih banyak didorong oleh terjadinya pelampauan pendapatan, dan bukan terjadi karena tidak terealisasinya belanja. Realisasi belanja daerah secara nasional adalah Rp 498,04 triliun dengan komposisi realisasi belanja daerah secara nasional didominasi oleh belanja pegawai

yaitu sebesar 46,2%, diikuti oleh belanja modal yaitu sebesar 21,7%, belanja barang dan jasa sebesar 21,2%, dan belanja lainnya sebesar 10,8%.

PENELITIAN TERDAHULU DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006, dalam Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan Pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H1: DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007), Solikin (2007) dan Putro (2011) memberikan bukti empiris bahwa PAD mempengaruhi Pemda dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

SILPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) menguatkan hal tersebut dimana SILPA berpengaruh

positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: SILPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Belanja modal yang dilakukan oleh daerah pada dasarnya adalah untuk kepentingan pelayanan terhadap publik, baik berupa sarana dan prasarana yang akan menunjang efektif dan efisiennya pelayanan tersebut. Penduduk yang semakin banyak akan membutuhkan pelayanan yang semakin banyak pula dibandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal

Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berupa DAU, PAD, SILPA, dan Belanja Modal serta Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Pertumbuhan Ekonomi seluruh Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. Tahun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2011-2012.

Data – data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari LKPD yang terdapat pada BPK dan BPS. Dalam penelitian ini ada 2 satuan variabel yaitu dalam persentase yaitu pertumbuhan ekonomi, dan angka riil yaitu belanja modal, PAD, DAU, SILPA, luas wilayah, jumlah penduduk. Untuk menyamakan satuan tersebut maka peneliti menggunakan logaritma untuk semua variabel independen dan variabel dependen, hal ini juga dilakukan dalam penelitian hilmi (2012).

Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk, PAD, DAU, SILPA, dan belanja modal.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2006), yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah model regresi antar variabel bebas saling berkorelasi atau tidak. Jika terjadi korelasi antar variabel independen maka ditemukan adanya masalah multikolinieritas. Untuk mengujinya dapat dilihat dari nilai VIF dan nilai Tolerance. Dikatakan tidak mengandung multikolinieritas, apabila nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 .

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data cross-sectional). Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode

waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang (sebelumnya). Pengujian menggunakan uji Durbin Watson untuk melihat gejala autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari satu residual satu ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji glejser yaitu dengan cara meregres variabel dependen dengan nilai absolute dari residual (Abs_Res). Jika hasil pengujian diperoleh nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

a. Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini semua hipotesis diuji dengan metode regresi linier berganda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dengan jenis time series data dan cross section data (data panel) dalam bentuk tahunan. Data time series yang digunakan dimulai dari periode 2011 sampai 2012 (2 tahun).

Sedangkan data cross section-nya adalah data diperoleh dari seluruh kota yang ada di 5 provinsi dipulau jawa, dengan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan teknik estimasi yang digunakan untuk mencari persamaan regresi menggunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Squares – OLS) untuk menganalisis pengaruh DAU, PAD, SILPA, luas wilayah, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dalam hubungannya dengan alokasi belanja modal.

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat diformulakan sebagai berikut:

$$BM_{t+1} = \alpha + \beta_1 DAU_t + \beta_2 PAD_t + \beta_3 SiLPA_t + \beta_4 LUAS_t + \beta_5 JUMLAH_t + \beta_6 PERE_t + e$$

Dimana:

α	= konstanta
β_i	= intersep/slope/koeffisien regresi
BM	= Belanja Modal
DAU	= Dana Alokasi Umum
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
SiLPA	= Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
LUAS	= Luas Wilayah
JUMLAH	= Jumlah Penduduk
PERE	= Pertumbuhan Ekonomi
t	= periode
e	= error

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2006). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2006).

c. Uji t (t-test)

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Dalam uji ini, digunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 diterima ($t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$) artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. H_a diterima ($t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$) artinya variabel independen secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

d. Pengujian Simultan (Uji statistik f)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji f dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi f pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan level of significant 5%.

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), artinya secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah sepulau Jawa pada tahun 2011-2012. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Berdasarkan metode tersebut maka jumlah sampel penelitian yang diperoleh adalah 224 sampel yang memenuhi kriteria. Perincian sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Jumlah Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten sepulau jawa pada tahun 2011-2012	236
Pemda yang tidak memiliki LKPD yang telah diaudit	12
Jumlah sampel	224

A. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini untuk menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum. Adapun hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Hasil Uji Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	224	10,70	12,02	11,2602	,25274
PAD	224	10,48	12,36	11,1107	,33915
DAU	224	10,97	12,22	11,8026	,17672
SILPA	224	10,06	12,75	11,0979	,33441
Jumlah Penduduk	224	5,07	6,70	5,9626	,32400
Luas Wilayah	224	1,26	3,62	2,8154	,59734
Pertumbuhan Ekonomi	224	-1,71	-1,04	-1,2357	,09067
Valid N (listwise)	224				

Tabel 4.2 diatas memberikan gambaran statistik deskriptif pada setiap variabel penelitian. Jumlah dalam penelitian ini adalah 224 sampel. Tabel di atas menunjukkan variabel belanja modal memiliki nilai minimum 10,70; nilai maksimum 12,02; nilai rata-rata 11,2602 dan standar deviasi sebesar 0,25274. Variabel PAD memiliki nilai minimum 10,48; nilai maksimum 12,36; nilai rata-rata 11,1107; dan standar deviasi sebesar 0,33915. Variabel DAU memiliki nilai minimum 10,97; nilai maksimum 12,22; dengan nilai rata-rata sebesar 11,8026; dan standar deviasi 0,17672.

Variabel SILPA memiliki nilai minimum 10,06; nilai maksimum 12,75; dengan nilai rata-rata sebesar 11,0979; dan standar deviasi 0,33441. Variabel jumlah penduduk

memiliki nilai minimum 5,07; nilai maksimum 6,70; nilai rata-rata sebesar 5,9626; dan standar deviasi 0,32400. Variabel luas wilayah memiliki nilai minimum 1,26; nilai maksimum 3,62; dengan nilai rata-rata sebesar 2,8154; dan standar deviasi 0,59734. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum -1,71; nilai maksimum -1,04; dengan nilai rata-rata sebesar -1,2357; dan standar deviasi 0,09067.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			224
Normal Parameters(a,b)	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,16724985
Most Differences	Extreme	Absolute	,056
		Positive	,053
		Negative	-,056
Kolmogorov-Smirnov Z			,832
Asymp. Sig. (2-tailed)			,493

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang diperoleh melalui uji *one-sample kolmogorov-smirnov* (KS) sebesar 0,493 menunjukkan lebih besar dari α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (D-W), disajikan pada berikut:

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,143(a)	,020	-,007	,11249	1,477

a Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Pendapatan asli daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah

b Dependent Variable: abs

Dari tabel diatas pada model persamaan menunjukkan bahwa nilai sebesar 1,477 pada daerah D-W diantara -2 sampai dengan +2 berarti model regresi tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menggunakan metode *variance inflation factors* (VIF) disajikan pada tabel dibawah:

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients(a)

MODEL		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,550	1,132		4,020	,000		
	Pendapatan asli daerah	,172	,064	,231	2,692	,008	,274	3,652
	Dana Alokasi Umum	,239	,108	,167	2,208	,028	,353	2,832
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	,045	,051	,060	,891	,374	,446	2,240
	Jumlah Penduduk	,325	,097	,416	3,344	,001	,130	7,684
	Luas Wilayah	-,013	,042	-,031	-,314	,754	,207	4,838
	Pertumbuhan Ekonomi	,343	,136	,123	2,513	,013	,844	1,185

a Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 4.5 menunjukkan nilai *tolerance* menunjukkan semua variabel independen dalam penelitian ini lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk semua variabel kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian.

4. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *glejser* disajikan pada tabel berikut:

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	B	Std. Error
1	(Constant)	,840	,751		1,118	,265		
	PAD	-,006	,042	-,018	-,144	,886	,274	3,652
	DAU	-,075	,072	-,118	-1,048	,296	,353	2,832
	SILPA	,006	,034	,017	,169	,866	,446	2,240
	Jumlah Penduduk	,059	,064	,172	,922	,358	,130	7,684
	Luas Wilayah	-,011	,028	-,057	-,383	,702	,207	4,838
	PE	,120	,090	,097	1,326	,186	,844	1,185

Dependent Variable: abs

Hasil uji *glejser* menunjukkan tidak satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat. Hal ini terlihat dari tingkat probabilitas signifikansi di atas 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

B. Uji Hipotesis

1. Uji Pengaruh Simultan (Uji Nilai f)

Pengujian pada nilai f dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi, jika nilai sig < alpha (0,05) maka terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji nilai f disajikan pada table berikut :

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,006	6	1,334	46,421	,000(a)
	Residual	6,238	217	,029		
	Total	14,244	223			

a Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Pendapatan asli daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah

b Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.7. Diperoleh nilai signifikansi (0,000) < alpha (0,05) yang artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji Parsial (Uji Nilai t)

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda diperoleh hasil yang disajikan pada table berikut:

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,550	1,132		4,020	,000
	PAD	,172	,064	,231	2,692	,008
	DAU	,239	,108	,167	2,208	,028
	SILPA	,045	,051	,060	,891	,374
	JumlahPenduduk	,325	,097	,416	3,344	,001
	Luas Wilayah	-,013	,042	-,031	-,314	,754
	PertumbuhanEkonomi	,343	,136	,123	2,513	,013

a Dependent Variable: Belanja Modal

Dari tabel 4.8. dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{BM = 4,550 + 0,172 DAU + 0,239 PAD + 0,045 SILPA + 0,325 JUMLAH PENDUDUK - 0,013 LUAS WILAYAH + 0,343 + e}$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

a. Dana alokasi umum terhadap belanja modal

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel ukuran dana alokasi umum memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,239 dengan signifikansi sebesar $0,028 <$

alpha (0,05) sehingga dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis satu diterima.

b. Pendapatan asli daerah terhadap belanja modal

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel ukuran pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,172 dengan signifikansi sebesar $0,008 < \alpha (0,05)$ sehingga pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis dua diterima.

c. Sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel ukuran sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,045 dengan signifikansi sebesar $0,374 > \alpha (0,05)$ sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis tiga ditolak.

d. Luas wilayah terhadap belanja modal

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel ukuran luas wilayah memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,013 dengan signifikansi sebesar $0,754 > \alpha (0,05)$ sehingga luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis empat ditolak.

e. Jumlah penduduk terhadap belanja modal

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel ukuran jumlah penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,325 dengan signifikansi sebesar $0,001 < \alpha (0,05)$ sehingga jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis lima diterima.

f. Pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal

Berdasarkan tabel 4.8. menunjukkan bahwa variabel ukuran pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,343 dengan signifikansi sebesar $0,013 < \alpha (0,05)$ sehingga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis enam diterima.

1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut:

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,750(a)	,562	,550	,16955	1,370

a Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Pendapatan asli daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah

b Dependent Variable: Belanja Modal

Dari hasil tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah 0,550 atau 55%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 55%, sedangkan sisanya sebesar 45% (100% - 55%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

1. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel PAD menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siswanto (2012) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. PAD secara statistik berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dapat memberi sedikit acuan bahwa PAD sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut, Oleh karena itu daerah hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan.

Dengan meningkatnya PAD dapat memberi keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Putro dan Pamudji, 2011). Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut.

2. Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian hipotesis untuk variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian Harianto dan Adi (2007) serta Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyimpulkan bahwa dana DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Adanya dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan pemerintah daerah lebih leluasa dalam

menggunakan dana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan pembelanjaan lainnya.

DAU merupakan bentuk transfer dana yang paling penting selain dana bagi hasil. Transfer DAU merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan kemampuan ekonomi daerah. Tujuan transfer DAU adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah

3. Pengaruh SILPA Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian hipotesis untuk variabel SILPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian Eriyati (2014) bahwa SILPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kota dan pemerintah daerah belum memaksimalkan fasilitas yang diberikan oleh undang undang secara baik untuk meningkatkan pertumbuhan belanja modal daerahnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kekayaan suatu daerah tersebut.

Sebaiknya pemerintah kota dan pemerintah daerah lebih memaksimalkan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membenahi fasilitas dan lebih menggali kemampuan atau potensi dari suatu daerah itu sendiri agar daerah tersebut lebih baik lagi segi finansialnya serta tidak terlalu bergantung dari dana yang diberikan oleh pemerintah.

4. Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian hipotesis untuk variabel luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh ardhini (2011) yang menyatakan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian menunjukkan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal dimungkinkan karena luas wilayah kabupaten dan kota yang berada dipulau jawa yang luasnya berbeda beda, dengan sarana serta prasarana di tiap daerah tersebut dapat dinilai sudah memadai, sehingga untuk memperbaiki sarana prasarana publik yang ada di setiap kabupaten dan kota dianggap belum waktunya untuk segera direalisasi, pemerintah kabupaten dan kota masih mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana publik yang ada sekarang, disisi lain pemerintah kota dan pemerintah daerah juga tidak hanya melihat luas wilayahnya saja, melainkan juga potensi yang terkandung dalam suatu daerah tersebut.

5. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian hipotesis untuk variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Abdul Aziz dan Ririn Wulandari (2013) yang mengatakan bahwa kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dari hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam merealisasikan belanja modalnya, pemerintah kota dan pemerintah daerah masih mempertimbangkan aspek jumlah penduduk. Karena jumlah penduduk merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan dalam mengelola daerahnya apabila suatu daerah ingin mencapai indeks pembangunan manusia sebagai human capital yang pada akhirnya akan ikut berdampak pada perekonomian daerah.

6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian hipotesis untuk variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Wulandari (2013) bahwa pertumbuhan ekonomi yang besar maka akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula.

Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan pertumbuhan perekonomian suatu daerah tiap tahunnya. Tanggung jawab

pemda kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui belanja modal sehingga dapat memfasilitasi masyarakatnya agar lebih mudah dalam mencapai suatu tujuannya. Jika pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik maka pemda akan meningkatkan alokasi belanja modal dari tahun ketahunnya guna melengkapi sarana dan prasarana yang ada.

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian di atas, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.
2. DAU ternyata berpengaruh positif terhadap belanja
3. SILPA tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.
4. Luas wilayah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.
5. Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap belanja modal.
6. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti, diantaranya adalah:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran

ukuran tau jenis jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan kondisi makro ekonomi.

2. Periode waktu penelitian hendaknya lebih diperpanjang sehingga dapat diketahui lagi lebih jauh kecenderunganya dalam jangka panjang

3. Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu yang pendek, yaitu 2 tahun

2. Study ini hanya meneliti di pemerintahan daerah dan kota pulau jawa, jadi belum bisa melihat kecenderungan di daerah lainya selain pulau jawa.